

Abstrak

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang berdampak secara sistemik terhadap keberlanjutan ekologi dan hak hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat penggunaan hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum kriminalisasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup serta mengevaluasi rasionalitas kebijakan kriminalisasi dalam perspektif perlindungan ekologi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum kriminalisasi dalam UUPPLH mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan penal yang berbasis pada keadilan ekologis, antara lain melalui penerapan prinsip strict liability dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum kriminalisasi agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang restoratif dan berorientasi pada pemulihan ekologi.

Kata kunci: Politik Hukum, Kriminalisasi, Tindak Pidana Lingkungan, Keadilan Ekologis.

Abstract

Environmental pollution and destruction are forms of modern crimes that have systemic impacts on ecological sustainability and the right of communities to a healthy environment. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management strengthens the role of criminal law as an instrument for enforcing environmental law. This research aims to analyze the legal politics of criminalization in environmental crimes and to evaluate the rationality of criminalization policies from the perspective of ecological protection.

This study uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and legal policy approaches. The results show that the legal politics of criminalization in the Environmental Protection and Management Law reflects a shift in paradigm from a predominantly administrative approach toward a penal approach grounded in ecological justice. This shift is reflected in the adoption of principles such as strict liability and corporate criminal responsibility. However, its effectiveness is still constrained by several factors, including legal substance, institutional structure, and legal culture. Therefore, a reconstruction of the legal politics of criminalization is necessary so that environmental law enforcement is not only repressive in nature but also restorative and oriented toward ecological recovery.

Keywords: *Legal Politics, Criminalization, Environmental Crime, Ecological Justice.*